

PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Atih Rohaeti Dariah**

Abstrak

Berdasarkan publikasi berbagai lembaga internasional yang terkait dengan kualitas bangsa beberapa negara baik tingkat regional maupun global, Indonesia selalu berada pada posisi yang tidak mengembirakan. Fenomena ini mendorong untuk dilakukannya kajian terhadap proses pembangunan ekonomi di Indonesia, karena pembangunan ekonomi sesungguhnya merupakan integrasi dinamika aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Ditemukan ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dibarengi oleh peningkatan kualitas SDM, tercermin pada perubahan struktur ekonomi yang tidak diikuti oleh perubahan struktur tenaga kerjanya. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari fondasi social organization sebagaimana mestinya termasuk di dalamnya sistem dan implementasi pendidikan. Kenyataannya, penyelenggaraan pendidikan banyak direduksi, sehingga tidak menghasilkan output sebagaimana yang diharapkan.

Kata kunci: pembangunan ekonomi, pendidikan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketika lembaga-lembaga internasional seperti World Bank (WB), UNDP, Unesco, Usaid, Asia Week, IIMD (*International Institute for Management Development*), PERC (*Political and Economical Risk Consultancy*) mempublikasikan indeks ekonomi-sosial-politik bangsa-bangsa di dunia, Indonesia selalu berada pada urutan yang tidak menyenangkan.

Publikasi yang dikeluarkan oleh IIMD (2001), suatu organisasi internasional yang bermarkas di Kota Lausanne, Swiss, tentang peringkat daya saing ekonomi, dari sebanyak 49 negara yang disusun dalam sistem keperingkatan ternyata Indonesia berada pada posisi paling rendah; yaitu

** **Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si.**, adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisba

peringkat ke-49. Negara-negara tetangga seperti : Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Korea Selatan semua memiliki peringkat lebih baik.

Hasil studi PERC (2001) yang terkait dengan kualitas SDM dan ketidakmapanan sistem hukum, mendudukkan Indonesia di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Negara dengan kualitas SDM tertinggi di Asia adalah Korea Selatan dengan skor 3,09 kemudian diikuti oleh Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina, Malaysia, Hongkong, Filipina, Thailand, Vietnam, dan baru Indonesia dengan skor 6,56. Malaysia dengan skor 4,17, bangsa yang sebagian besar warganya serumpun dengan Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal ketidakmapanan sistem hukum setelah Singapura dengan skor 3,28 dan Hongkong dengan skor 3,41. Indonesia dengan skor 9,22 kembali di urutan terakhir, lebih buruk dibandingkan dengan Vietnam yang berada pada urutan ke 11. Hanya dalam masalah inkonsistensi kebijakan publik, prestasi Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan Vietnam, yakni urutan ke 11 dengan skor 9,00. Namun demikian tetap di bawah Malaysia yang menempati urutan ke tiga setelah Singapura dengan skor 1,5 dan Hongkong dengan skor 3,83.

Pada tahun 2002 PERC melakukan studi dengan lingkup dunia tentang urutan negara dalam korupsi. Skor paling tinggi yakni 9,7 diduduki oleh Finlandia, artinya negara ini relatif bersih dari masalah korupsi. Indonesia di urutan ke 96 dengan skor 1,9, sedikit lebih baik dibandingkan dengan Bangladesh yang berada di urutan terakhir yakni ke 102 dengan skor 1,2. Negara-negara lainnya yang tingkat korupsinya lebih tinggi dari Indonesia adalah : Kenya, Angola, Madagaskar, Paraguay, dan Nigeria. Kalau dilihat lebih jauh kelima negara tersebut identik dengan kemiskinan. Apakah kemudian bisa diprediksi adanya korelasi positif antara perilaku korup dengan jumlah penduduk miskin?

Laporan UNDP, *United Nations Development Programme*, dalam "*Human Development Report 2004*" tentang kualitas pembangunan manusia, dari 174 negara yang diurutkan berdasarkan kualitas manusia atau bangsanya, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-111. Sementara Singapura urutan ke 25, Malaysia ke 59, Thailand dan Filipina ke 76 dan 83.

Terlepas dari motivasi dan sasaran dibalik publikasi tersebut yang mungkin bermuatan politis, pesan secara implisit yang melekat pada indeks tersebut menyiratkan lemahnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejuahmanakah kebenaran hasil survey yang dilakukan oleh

pihak asing tersebut? sulit untuk memberi justifikasi yang komprehensif. Namun apa yang dilihat di sekelilingnya seperti 66,6% penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas hanya lulusan SD ke bawah, pertumbuhan ekonomi yang rendah sejak krisis dan lebih didorong oleh konsumsi bukan investasi, jumlah penduduk yang miskin 16,6% dari total jumlah penduduk, perkembangan ekspor yang tidak menggembirakan karena lebih pada produk primer, perilaku korup sebagian besar tim legislatif maupun eksekutif, sudah cukup mencerminkan kualitas bangsa ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berbagai indikator secara internasional yang mencerminkan kualitas bangsa yang kemudian muncul dalam angka sebagai sebuah indeks, merupakan variabel-variabel urgensi yang terkait dengan proses pembangunan ekonomi. Dalam wacana pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah *necessary condition* (kondisi prasyarat), tapi bukan *sufficient condition* (kondisi yang mencukupi) untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah lain yang harus menyertainya adalah peningkatan skill, penguasaan teknologi, menurunnya kemiskinan, transparansi proses, dan implementasi kebijakan publik, serta tingkat partisipasi sosial. Semua item ini mengangkat performa aspek sosial dan kelembagaan.

Rendahnya angka-angka indeks kualitas bangsa yang diterima Indonesia, memancing pertanyaan besar apakah ini berarti gagalnya pembangunan ekonomi di Indonesia? Dalam rangka mengurai peta permasalahan dan mengkaji item-item determinasi dibalik rendahnya kualitas bangsa Indonesia, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja ekonomi, sosial, dan kelembagaan sebagai tiga unsur pembentuk keberhasilan pembangunan ekonomi?
2. Bagaimana peranan dan eksistensi dunia pendidikan dalam proses pembangunan ekonomi?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Menganalisis kinerja ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang tercermin dalam variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan kelembagaan yang merupakan tiga aspek penting penentu kualitas suatu bangsa
2. Menganalisis peranan dan eksistensi dunia pendidikan yang menyangkut sistem pendidikan di Indonesia dalam proses pembangunan ekonomi

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembangunan Ekonomi: Proses Integrasi Aspek Ekonomi, Sosial, dan Kelembagaan

Professor Dudley Seers mengangkat isu mendasar tentang arti pembangunan ekonomi dengan mempertanyakan hal-hal berikut: apa yang terjadi dengan kemiskinan? pengangguran? ketidakmerataan? Apabila ketiga hal ini semakin menurun dalam arti kinerjanya semakin baik berarti pembangunan ekonomi sedang terjadi di wilayah tersebut. Namun sebaliknya jika satu atau dua dari ketiga masalah tersebut ternyata kinerjanya semakin buruk, maka belum dikatakan sudah terjadi pembangunan ekonomi sekalipun pendapatan per kapita naik dua kali lipat (Nafziger, 1997).

Dalam literatur ekonomi pembangunan lainnya, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadinya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dalam distribusi output dan struktur ekonomi. Perubahan ini mencakup: penurunan penduduk miskin, penurunan pangsa pertanian terhadap GNP (*Gross National Product*), kenaikan pangsa industri dan jasa, kenaikan angkatan kerja yang terdidik dan terlatih, peningkatan teknologi.

Dari dua definisi yang secara substansi bersifat komplementer, isu utama dalam proses pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yakni kenaikan nilai riil total produksi barang dan jasa yang hanya bisa terjadi jika tersedia SDA (*natural capital*), modal buatan manusia (*human made capital*), SDM (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Fokus teori klasik tentang pertumbuhan ekonomi lebih pada interaksi antara *natural capital*, *human made capital*, dan *human capital*. Berbagai studi kuantitatif mengenai hal ini di negara-negara barat memperlihatkan bahwa bukanlah pertumbuhan modal fisik (*human made capital*) yang

menyebabkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi justru pertumbuhan *human capital* yang bertumpu pada pendidikan sebagai sumber penting dari kemajuan ekonomi negara-negara maju. Studi empiris yang menjustifikasi temuan ini akhirnya mendorong lahirnya paradigma baru dalam teori ekonomi pembangunan yakni *knowledge based economy*. Pergeseran paradigma ini makin menegaskan, betapa aspek SDM bernilai sangat strategis dalam pembangunan.

Modal sosial berupa *trust*, kelembagaan formal (regulasi, kebijakan) maupun informal (norma, adat istiadat) merupakan kekayaan yang *intangible* yang dilansir sangat menentukan kualitas bangsa. Ketika yang lahir adalah sebuah kebijakan yang bias pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan menghambat akses partisipasi masyarakat lainnya, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan berbuah ketimpangan baik ketimpangan pendapatan, sektor maupun wilayah dan kemiskinan tetap muncul. Ketika sebuah regulasi bisa dengan mudah dimanipulasi oleh kelompok tertentu karena rendahnya penegakan hukum, dan ketika sebagian orang bisa dengan leluasa sebagai *free rider* dan *rent seeker* maka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan akan gagal. Beberapa studi empiris diantaranya studi Bardhan, Stiglitz, Sokoloff mengungkapkan secara tegas bahwa kualitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara maju.

Berdasarkan pemaparan di atas jelas terungkap bahwa item utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah kualitas SDM yang bertumpu pada level pendidikan dan kualitas kelembagaan yang memwadahi interaksi antar masyarakat.

2.2 Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi: Proses Dua Arah

Penganut *The New Growth Theory* beranggapan bahwa kecepatan perkembangan teknologi dapat tercermin pada akumulasi modal manusia yang diukur dengan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh selama manusia itu bekerja (Ogawa dalam Moertiningsih, 1995). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi pesat umumnya dimulai dengan kualitas SDM yang tinggi yang diukur dengan rasio pendidikan terhadap pendapatan nasional. Peneliti lain mengatakan bahwa tingkat pendidikan rata-rata tenaga kerja merupakan indikator utama dalam peningkatan perekonomian suatu bangsa.

Amich Alhumami (2000) menegaskan bahwa pendidikan dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi, bahwa pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang produktif, karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas yang memadai merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, sehingga memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai ekonomi pendidikan itu terletak pada sumbangannya dalam menyediakan atau memasok tenaga-tenaga kerja terdidik, terampil, berpengetahuan, dan berkompotensi tinggi sehingga lebih produktif. Lebih dari itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju di masa depan, serta menanamkan sikap mental dan etos kerja tinggi. Kedua hal tersebut, secara psikologis, akan melahirkan energi yang dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan di masa depan.

Mengupas hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi tidak lepas dari keterkaitan antara tatanan sistem pendidikan dengan karakter ekonomi dan sosial masyarakat (Todaro, 1994). Bila struktur sosial dan ekonomi masyarakat sangat tidak merata, sistem pendidikan akan mencerminkan keadaan tersebut seperti tampak dari kelompok masyarakat yang dapat terus menikmati jenjang pendidikan berikutnya. Pada saat yang bersamaan pendidikan akan mempengaruhi bentuk dan arah perkembangan masyarakat di masa mendatang. Jadi, hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi merupakan proses dua arah.

Lebih jelas, Hayami (2001) melakukan analisa keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi yang diproxy dengan variabel tingkat partisipasi sekolah untuk pendidikan dan variabel GNP per kapita untuk pembangunan ekonomi. Observasi meliputi sejumlah negara baik negara maju maupun negara berkembang. Korelasi positif dengan nilai yang cukup tinggi yakni 0,84 menunjukkan terjadinya hubungan dua arah antara pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Psacharopoulos dan Woodhal (1997 dalam Alhumami) menunjukkan bahwa kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat variasi. Di kawasan Amerika Utara, persentase kontribusi per tahun cukup tinggi, yakni 25,0 persen di Amerika Serikat dan 15 persen di Kanada. Sementara di kawasan Eropa yang tertinggi mencapai 14,0 persen di Belgia dan 12,0 persen di Inggris; namun ada juga

yang amat kecil seperti di Jerman dan Yunani, masing-masing 2,0 persen dan 3,0 persen. Di kawasan Amerika Latin, persentase tertinggi mencapai 16,5 persen di Argentina, 6,0 persen di Honduras, dan yang paling rendah yakni hanya 0,8 persen di Meksiko. Sedangkan di kawasan Asia, juga terbilang relatif tinggi yakni 15,9 persen di Korea Selatan, 14,7 di Malaysia, dan 10,5 persen di Filipina. Kecuali di Jepang yang hanya 3,3 persen. Demikian pula di kawasan Afrika seperti Ghana, Nigeria, dan Kenya, masing-masing 23,2 persen, 16,0 persen, dan 12,4 persen.

Riset-riset tersebut semakin menjustifikasi pentingnya investasi dalam modal manusia untuk meningkatkan kapasitas SDM, dan tentunya pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Investasi yang bersifat jangka panjang ini, seyogyanya tidak terbatas pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan namun juga inovasi dari esensi pendidikan itu sendiri yakni memanusiakan manusia karena dia adalah sosok yang unik dimana di dirinya melekat fikir, sikap, watak, sekaligus perasaan.

3. Pendidikan Dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

3.1 Perjalanan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pada tahun 1991 perekonomian Indonesia mengalami transformasi yang menempatkan Indonesia menjadi negara semi industri karena pangsa sektor industri manufaktur sekitar 20% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dibanding tahun 1980 yang hanya sekitar 9,4%. Sementara kontribusi sektor pertanian semakin menurun, pada tahun 1980 pangsa sektor pertanian sekitar 25,8% dan menjadi 19,4% pada tahun 1990. Meskipun perekonomian sempat mengalami resesi pada tahun 1998 dan berada dalam tahap pemulihan sampai saat ini, namun struktur ini tidak berubah dalam arti sektor industri tetap mendominasi PDB Indonesia.

Pergeseran struktur ekonomi dari dominasi sektor pertanian ke industri seharusnya sekaligus menggambarkan terjadinya peningkatan *skill* dan penguasaan teknologi oleh masyarakatnya, karena proses produksi (*manufacturing*) yang menciptakan nilai tambah dari pengolahan bahan-bahan mentah produk sektor pertanian tidak mungkin terjadi tanpa skill dan pemanfaatan teknologi.

Namun yang terjadi di Indonesia transformasi ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pergeseran struktur tenaga kerjanya. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 1991 sebesar 53,92% masih di sektor pertanian sedangkan di

sektor industri hanya 10,4%. Berarti bergesernya struktur ekonomi tersebut bukan karena aksi internal yang sudah benar-benar disiapkan, namun lebih karena peran PMA (Penanaman Modal Asing) yang membawa modalnya, teknologinya, tenaga ahli, dan manajemennya.

Hal tersebut semakin nampak setelah 10 tahun kemudian, sekalipun sudah terjadi penurunan pangsa pertanian dibanding tahun 1991, pada tahun 2001 distribusi tenaga kerja masih tetap lebih berat ke sektor pertanian yakni sekitar 43,76%. Sedangkan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur hanya 13,3%. Sampai saat ini posisi ini tidak mengalami perubahan yang berarti.

Melimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian menimbulkan barisan masalah yang kompleks, kemiskinan pedesaan yang meningkat, produktivitas sektor pertanian yang rendah, degradasi lahan, kerawanan pangan, sikap emosional, urbanisasi, dan kriminalitas.

Gap antara tingginya pangsa sektor industri dengan besarnya angkatan kerja di sektor pertanian, diperburuk dengan kondisi mandulnya demokratisasi, tertutupnya saluran komunikasi antara sebagian besar masyarakat dengan para pembuat kebijakan. Realitas ini sepertinya tak terasa karena terbuai oleh kinerja makroekonomi yang mengesankan berbagai pihak. Betapa tidak, laju pertumbuhan ekonomi selama Pembangunan Jangka Panjang I rata-rata 7% per tahun, pertumbuhan pendapatan per kapita selama periode 1985-1996 rata-rata 5,4% per tahun. Pada tahun 1988 pendapatan per kapita Indonesia hanya \$ 500, tahun 1995 \$ 980. Investor dan kreditur asing sangat percaya dan merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia, nilai kurs rupiah sangat stabil karena selalu dikendalikan dan ternyata sebenarnya sangat *overvalue*.

Selanjutnya baru disadari ternyata kinerja makroekonomi tersebut fatamorgana. Perekonomian Indonesia memasuki periode resesi dimana kontraksi PDB mencapai 17% tahun 1998, dan hanya mampu tumbuh di bawah 5% sampai akhir tahun ini. Pendapatan per kapita turun jadi \$ 830 untuk tahun ini, nilai rupiah rendah dan fluktuatif, investor enggan menanamkan modalnya, padahal sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Mengejutkan, banyak hasil riset yang membuktikan bahwa dampak modal asing baik hutang luar negeri maupun modal asing langsung selama periode Pembangunan Jangka Panjang I ternyata negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti studi Alkadri, Soemantri, Effendi, dan Arief. Fenomena ini sangat kontradiktif dengan teori dimana hutang luar negeri dan modal asing langsung merupakan sumber modal untuk menutupi gap *saving-investment* di domestik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Identifikasi Soemitro terhadap permasalahan ini melahirkan *statemen* bahwa sudah terjadi kebocoran sebesar 30% dalam anggaran pembangunan. Ini menggambarkan rendahnya kualitas kelembagaan di Indonesia, yang tercermin pada regulasi-regulasi yang tidak bias pada rakyat kecil.

Dimanakah sebenarnya akar permasalahannya? Yang jelas teori tidak salah, mungkin asumsi dasar bekerjanya teori tersebut yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang para pembuat kebijakan khilaf terhadap analisis asumsi tersebut, terpancing oleh kepentingan politis untuk meraih target tertentu yang belum tentu bias pada kepentingan masyarakat banyak.

Mengacu pada pemikiran Thurow (1999) yang mengungkapkan piramida kekayaan yang terdiri dari enam fondasi, fondasi dasar dari kemakmuran suatu bangsa adalah *social organization*. Aspek ini sangat mendasar karena terkait dengan kemampuan pemerintah mengorganisasi ketersediaan fasilitas publik seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, pengembangan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan demokratisasi, akses terhadap lembaga partai, dan fasilitas publik lainnya. Fondasi kedua adalah *entrepreneurship*, bahwa setiap individu dapat mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. Kreativitas ini hanya bisa timbul dalam kondisi keberadaan *social organization* mendukung. Fondasi ketiga adalah *creating knowledge*, yang diyakini bahwa ilmu pengetahuan akan menghasilkan terobosan dasar dalam pengembangan teknologi yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Fondasi keempat adalah *skills*, bahwasanya penduduk yang memiliki keahlian sangat dibutuhkan untuk menemukan pengetahuan baru, proses, dan produk baru. Fondasi kelima adalah *tools*, bahwa kemajuan ekonomi dan kekayaan adalah fungsi dari investasi *human made capital*. Fondasi terakhir adalah *natural and environmental resources*, bahwa pertumbuhan ekonomi bukan musuh untuk pihak-pihak yang peduli lingkungan.

Melalui pemikiran Thurow ini jawaban terhadap permasalahan yang dialami oleh perekonomian Indonesia bisa terungkap. Para pembuat kebijakan tidak memulai secara sungguh-sungguh untuk memperkuat fondasi paling bawah yakni *social organization*. Padahal ini adalah *leading*

factor atau *necessary condition* untuk mendorong produktivitas, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi. Bagaimana mungkin bisa terjadi pembangunan yang berkesinambungan hanya melalui investasi di *human made capital* tanpa ada peningkatan *skill*, pengetahuan, jiwa wirausaha, dan penguatan modal sosial. Semua kondisi prasyarat ini erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang dijalankan yang tidak hanya berisi pelajaran ilmu pengetahuan tapi juga esensi pendidikan yakni meningkatkan kepekaan dan tenggang rasa sosial serta sikap kritis terhadap fenomena bangsa.

3.2 Penyimpangan Sistem Pendidikan di Indonesia

Menurut Ace Suryadi (1999), pembangunan pendidikan adalah faktor terpenting dalam peningkatan kualitas SDM. Sistem pendidikan perlu diarahkan pada perwujudan sistem yang mampu menyesuaikan diri bahkan mungkin mendorong proses perubahan yang terarah untuk mencapai tantangan lingkungan yang berat dan terus berubah. Selanjutnya Ace (1999) memaparkan dari dimensi ekonomi dan iptek, sistem pendidikan harus mampu meningkatkan kemampuan belajar warga negara menguasai jenis-jenis keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan iptek yang terus berkembang. Dari dimensi sosial-budaya, sistem pendidikan mampu menanamkan sikap dan perilaku yang rasional di dalam suatu sistem budaya Indonesia yang kondusif, khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai kesehatan, produktivitas, kemandirian, serta etos kerja. Dari dimensi hankamnas, sistem pendidikan mampu menanamkan sikap, wawasan, dan perilaku bela negara baik secara fisik maupun non-fisik.

Dengan demikian sistem pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan sarana proses pembelajaran yang membentuk modal manusia. Pengembangan *skill* dan modal manusia pada gilirannya akan meningkatkan standar kehidupan. Berkaca pada Kanada yang memiliki sikap bahwa untuk sukses dalam era informasi Kanada perlu mendemokratisasi kesempatan untuk seluruh masyarakatnya guna mengembangkan dan mempertinggi modal manusia. Ini berarti perlu suatu komitmen politik untuk mengupayakan pemerataan kesempatan pengembangan diri masyarakat.

Apakah sistem pendidikan tersebut bisa berjalan? Dari sisi penyelenggaraan pendidikan, fakta menunjukkan bahwa selama ini kegiatan belajar mengajar masih cenderung didominasi oleh kegiatan guru (*teacher centered*), kendatipun fenomena proses pembelajaran didesain agar lebih mengarah pada kegiatan siswa (*student centered*).

Dimanakah persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap pendidikan? Dikhawatirkan pendidikan dipandang sebagai media untuk meningkatkan status, mendapatkan gelar, penguasaan materi, dan kedudukan. Hal ini nampak dari kecenderungan semakin menurunnya minat generasi muda pada ilmu-ilmu murni, karena tidak memberikan harapan yang menjanjikan di masa mendatang. Padahal kelompok ilmu ini merupakan basis untuk riset dan pengembangan.

Lemahnya pemahaman terhadap esensi pendidikan diperburuk oleh kebijakan dan perilaku pemerintah yang bias pada pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga suri tauladan tidak nampak dan pelayanan publik tidak berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Bagaimana pula persepsi dunia usaha atau industri terhadap dunia pendidikan? Terciptakah kondisi dependensi, saling membutuhkan antara universitas dengan sektor riil? Menyedihkan ketika tumpukan hasil riset hanya memperkaya katalog perpustakaan dan tidak terimplementasikan. Hal ini terjadi, mungkin sekali karena ada ketidakpercayaan dan keraguan dari kedua belah pihak. Pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan, ternyata tidak mampu memainkan perannya secara proporsional. Tidak adakah keinginan untuk membangun sinergitas antara pemerintah, pendidikan tinggi, dan industri?

Apakah setiap konsep akan selamanya jadi slogan? Ketika Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dirancang dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dan ketika perguruan tinggi disetting untuk memiliki tridharma, tampaknya tidak mengakar dan tumbuh di tengah-tengah fenomena masyarakat. Penyimpangan yang substansi dari esensi sistem pendidikan ini akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa.

4. Penutup

Kualitas bangsa Indonesia yang relatif rendah dalam percaturan internasional sangat terkait dengan kualitas SDM dan kelembagaan yang ada selama proses pembangunan ekonomi berjalan. Sejatinya, kedua aspek ini

merupakan kondisi prasyarat dalam menggiring pemanfaatan SDA dan modal fisik untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sayangnya, pendidikan yang merupakan fondasi dasar dalam membentuk kualitas SDM diterjemahkan secara sempit dan tidak bijak sehingga esensi pendidikan menjadi hilang dan tidak bermakna. Konsekuensinya, buah dari pendidikan adalah perilaku egois dan arogan yang melunturkan kepekaan dan tenggangrasa sosial.

Masih ada peluang untuk pembenahan, tidak sebatas pada konsep tapi strategi implementasi yang efektif dari sistem pendidikan yang sudah ada. Untuk itu, komitmen politik dari pembuat kebijakan akan sangat menentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aioetomo Sri Moertiningsih, Endang Pudjani, Lutzardo Tobing. 1995. *Peningkatan Keterampilan, Derajat Kesehatan, Dan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sdm Dalam Menyongsong Era Globalisasi*
- Amich Alhumami, 2000. "Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi". OPINI, *Kompas* Kamis, 27 Januari 2000
- Bardhan Pranab. *The Nature of Institutional Impediments to Economic Development*. University of California at Berkeley
- Effendi Nury and Femmy M. Soemantri. 2003. *Foreign Direct Investment and Regional Economic Growth in Indonesia: A Panel Data Study*, Paper is presented at the fifth IRSA International Conference, July 18-19 2003
- Hayami Yujiro. 2001. *Development Economics*, Second Edition, Oxford University Press
- Mulyani Sri dan Ninasapti Triaswati. 1995. *Tantangan Transformasi Sdm Indonesia Menghadapi Era Globalisasi*

- Nafziger E. Wayne. 1997. *The Economics Of Developing Countries*. Prentice Hall
- Sokoloff Kenneth L. *Institutions, Factor Endowments, And Paths Of Development In The New World*, Villa Borsig Workshop Series 2000 - The Institutional Foundations of a Market Economy
- Stiglitz Joseph E. *Challenges In The Analysis Of The Role Of Institutions In Economic Development*, Villa Borsig Workshop Series 2000 - The Institutional Foundations of a Market Economy
- Suryadi Ace. 1999. *Pendidikan, Investasi SDM, Dan Pembangunan: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka,
- Thurow Lester C. 1999 *Building Wealth The New Rules For Individuals, Companies, And Nation In A Knowledge-Based Economy*, HarperCOLLins Publishers
- Todaro Michel P. 1994. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Keempat